

Evaluasi Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Sumatera Barat

Nurhastuti^{1*}, Irdamurni², Damri³, Jehan Nabela Oktaviani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang

*e-mail: nurhastuti@fip.unp.ac.id

Abstract

Inclusive education in recent years has become a very interesting issue in the national education system. This is because inclusive education pays attention to the arrangement of students who have disabilities or special needs to be able to get education in public or regular schools instead of special education classes or special schools. In practice, there are many challenges that must be resolved, especially in regular schools in implementing inclusive education. The implementation of inclusive education in West Sumatra Province has been 23 (twenty-three) years. In this periode, it has shown a fairly long journey. Thus, the implementation of inclusive education in West Sumatra Province should be comprehensively evaluated for the realization of the ideals of inclusive education. In this study, the authors used a mix method approach, which is a combination of qualitative and quantitative approaches. Distribution of questionnaires to 9 principals and 18 teachers..

Keywords: *Inclusive; Education; Implementation.*

How to cite : Nurhastuti, N., Irdamurni, I., Damri, D., & Nabela Oktaviani, J. (2023). The Evaluation of Implementation of Inclusive Education in West Sumatera. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(2). pp. 224-232, DOI: <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v23i2.1696>



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam Pendidikan (Kurniawan & Aiman, 2020; Qomarudin & Safrudin, 2021). Dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pentingnya pendidikan inklusif adalah karena pendidikan itu adalah merupakan hak asasi manusia, selain itu pendidikan inklusif juga merupakan pendidikan yang baik dan dapat menumbuhkan rasa sosial (Moriña & Carballo, 2017; Suleymanov, 2015). Pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dalam setting pendidikan inklusif tidak hanya menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang terikat pada mata pelajaran saja, tetapi juga pendidikan inklusif dapat mengembangkan individu mandiri yang aktif dan bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat (Donohue & Bornman, 2018). Pembahasan tentang pendidikan inklusif telah membuktikan bahwa pendidikan inklusif sebagai sebuah layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi mereka sehingga tujuan pendidikan untuk menjadikan mereka sebagai individu yang mandiri bisa tercapai (David Wijaya, 2019; Mansur, 2019; Sulistyadi, 2014).

Semakin meningkatnya perhatian terhadap pendidikan inklusif dari banyak kalangan, khususnya para penyelenggara pendidikan, tidak secara otomatis implementasinya berjalan secara lancar. Akan tetapi, berbagai pandangan dan sikap yang justru dapat menghambat implementasi pendidikan inklusif semakin beragam. Pada tataran praktik di lapangan, implementasi pendidikan inklusif menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala yang sering dilaporkan adalah kesalahan pemahaman tentang konsep pendidikan inklusif, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak luwes dan sebagainya.

Implementasi pendidikan inklusif merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sekolah (Irvan, 2019; Mansur, 2018). Tidak ada cara yang mujarab, ampuh, spesial atau ilmu pendidikan yang bersifat “magis” dalam mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum. Pergerakan menuju pendidikan inklusif dalam sekolah baik dilihat dalam teori maupun dalam praktiknya membutuhkan perubahan. Pada awalnya, pendidikan inklusif membutuhkan format belajar yang berbeda, metode yang berbeda, dalam mengelompokkan anak dan dalam kegiatan pembelajaran pun dibedakan. Bahkan pada saat membuat perencanaan pembelajaran, hasil yang hendak dicapai pun dibuat berbeda. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah, termasuk komitmennya untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah masih menjadi masalah (Kasidah, 2017). Bahkan pandangan masyarakat sekitar terhadap pendidikan inklusif belum dapat dikatakan sepenuhnya mendukung terciptanya pendidikan inklusif.

Secara teori, keterlaksanaan pendidikan inklusif dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut “*index for inclusion*” (McMaster & Elliot, 2014; Polat, 2011). Indeks inklusif merupakan sumber daya untuk mendukung program pengembangan sekolah. Indeks inklusif ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu dimensi budaya (*creating inclusive cultures*), dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*), dan dimensi praktik (*evolving inclusive practices*) (Darma & Rusyidi, 2015; Jauhari, 2017). Setiap dimensi dibagi dalam dua bagian, yaitu dimensi budaya terdiri atas bagian membangun komunitas (*building community*) dan bagian membangun nilai-nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan terdiri atas bagian pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan bagian melaksanakan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*), sedangkan dimensi praktik terdiri atas bagian belajar dan memobilisasi sumber daya.

Khusus di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pendidikan inklusif telah menunjukkan perkembangan yang berarti (Gistituati et al., 2020). Keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif ditandai dengan lahirnya Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) pada Dinas Pendidikan. Selain itu, juga Pemerintah Provinsi membangun sekolah-sekolah unggulan yang juga menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memajukan dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, memberikan akses pendidikan yang makin terbuka bagi warga Sumatera Barat, termasuk masyarakat miskin. Juga, bertekad tahun 2015 ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Provinsi Sumatera Barat telah menginjak 23 (dua puluh tiga) tahun. Dalam kurun waktu ini sudah menunjukkan perjalanan yang cukup panjang. Maka, sudah seharusnya pelaksanaan pendidikan inklusif di Provinsi Sumatera Barat dievaluasi secara komprehensif demi terwujudnya cita-cita pendidikan inklusif. Proses evaluasi itu sendiri akan bermanfaat untuk melihat nilai-nilai inklusif yang telah terjadi pada Sekolah Dasar yang melayani siswa berkebutuhan khusus di Provinsi Sumatera Barat

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan mix metode yaitu gabungan dari pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, di mana data kuantitatif tersebut diperoleh melalui data sekunder.

Penelitian ini akan dilakukan di 3 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Setiap wilayah dipilih 3 Sekolah Dasar yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dianalisis dan disimpulkan maka penulis menggunakan analisis yang menghasilkan deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang berusaha membandingkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di lapangan dengan kriteria tertentu atau standar yang seharusnya. Kriteria yang disusun berupa kriteria kualitatif. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria kualitatif adalah indikator dalam komponen objek yang diteliti, yaitu indikator pembentuk dari implementasi pendidikan inklusi). Proses analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari responden kemudian ditarik kesimpulan secara umum (Lenaini, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Konteks Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pada komponen konteks penetapan kriteria keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 9 Kepala Sekolah dan 18 orang guru sebagai berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Komponen Konteks Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Pernyataan	Skor Jawaban										Skor Total	
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Pemerintah daerah mendukung program pendidikan inklusi.	5	18,5	22	81,5	-	-	-	-	-	-	27	100
2.	Ada bantuan tenaga pembimbing khusus oleh pemerintah.	-	-	-	-	9	33,3	18	66,7	-	-	27	100
3.	Ada kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan.	-	-	2	7,4	6	22,2	19	70,4	-	-	27	100
4.	Ada pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.	1	3,7	4	14,8	21	77,8	1	3,7	-	-	27	100
5.	Sekolah menggunakan kurikulum fleksibel.	3	11,1	22	81,5	2	7,4	-	-	-	-	27	100
6.	Sekolah telah terakreditasi A	4	14,8	23	85,2	-	-	-	-	-	-	27	100
7.	Ada evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi.	-	-	-	-	7	25,9	19	70,4	1	3,7	27	100
8.	Didukung oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan inklusi di sekolah.	1	3,7	1	3,7	5	18,5	20	74,1	-	-	27	100
9.	Lahan sekolah untuk menyediakan ruang khusus yang memadai.	-	-	3	11,1	7	25,9	17	63,0	-	-	27	100
10.	Terdapat banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah tersebut	8	29,6	19	70,4	-	-	-	-	-	-	27	100

Total	22	96	57	94	1	270
Total x Skor	110	384	171	188	1	854
Skor Ideal				1.350		
P (%)				63,3		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor total tanggapan responden terhadap indikator komponen konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 854 (63,3%). Skor total tanggapan responden tersebut dikategorikan cukup.

Secara lebih rinci, hasil penelitian indikator komponen konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat dijelaskan dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) Adanya kebijakan perundang-undangan sebagai landasan formal yang tertuang dengan jelas dan tegas, Berdasarkan hasil temuan komponen konteks tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa saat ini belum tertuang secara jelas dan tegas. Keadaan tersebut menyebabkan banyak sekolah yang kurang mengerti esensi pendidikan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti yang menghasilkan data bahwa isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrasi, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan sistem di sekolah; (b) Adanya tujuan penyelenggaraan program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang jelas dan terarah, Terkait hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penyebaran angket terlihat bahwa aspek yang telah sesuai dengan standar antara lain sudah ada anggaran khusus dari pemerintah yang disediakan untuk membantu sekolah-sekolah inklusi dalam APBN dan APBD, telah menggunakan kurikulum fleksibel, dan sekolah telah terakreditasi A; (c) Adanya kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusif.

Terkait hasil temuan penyelenggaraan pendidikan inklusif terhadap sosial budaya masyarakat menunjukkan budaya masyarakat kita sangat mendukung sebab hal ini sudah sejalan dengan filosofi masyarakat kita yaitu Pancasila dengan landasan Bhineka Tunggal Ika yaitu suatu wujud pengakuan kita tentang adanya keberagaman yang dimiliki setiap manusia. Hasil temuan ini sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Komponen Input Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Adapun pada komponen input penetapan kriteria keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 9 Kepala Sekolah dan 18 orang guru sebagai berikut.

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Komponen Input Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Pernyataan	Skor Jawaban										Skor Total	
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Proses penerimaan siswa baru bagi ABK diberlakukan sama dengan anak lainnya.	6	22,2	19	70,4	2	7,4	-	-	-	-	27	100
2.	Dalam penerimaan siswa ABK digunakan peralatan dan pengetahuan khusus.	-	-	4	14,8	8	29,6	15	55,6	-	-	27	100
3.	Tenaga pengajar (guru) memiliki kemampuan menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam rangka	9	33,3	15	55,6	3	11,1	-	-	-	-	27	100

No.	Pernyataan	Skor Jawaban										Skor Total	
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
	pelaksanaan program pendidikan inklusi.												
4.	Tenaga pengajar (guru) memiliki latar belakang pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa.	-	-	-	-	-	-	24	88,9	3	11,1	27	100
5.	Sekolah telah melakukan modifikasi kurikulum (KTSP) dan perangkat pembelajaran yang lain untuk mengakomodasi kebutuhan khusus ABK dalam setting pendidikan inklusi.	6	22,2	17	63,0	3	11,1	1	3,7	-	-	27	100
6.	Sekolah sudah melakukan modifikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK dalam setting pendidikan inklusi.	4	14,8	15	55,6	6	22,2	2	7,4	-	-	27	100
7.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam setting pendidikan inklusi.	6	22,2	12	44,4	5	18,5	4	14,8	-	-	27	100
8.	Sekolah telah memiliki sarana dan alat pembelajaran khusus, atau media pembelajaran khusus berdasarkan jenis kelainan ABK yang ada.	1	3,7	6	22,2	-	-	20	74,1	-	-	27	100
9.	Sekolah memiliki dana yang cukup dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi.	8	29,6	9	33,3	8	29,6	2	7,4	-	-	27	100
10.	Pemerintah beserta masyarakat membantu penyediaan dana bagi sekolah inklusi.	11	40,7	16	59,3	-	-	-	-	-	-	27	100
Total		51		113		35		68		3		270	
Total x Skor		255		452		105		136		3		951	
Skor Ideal								1.350					
P (%)								70,4					

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016.

Secara lebih rinci, hasil penelitian indikator komponen input penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat dijelaskan dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) Adanya peserta didik (siswa)

berkebutuhan khusus, Berdasarkan hasil temuan penelitian komponen input terhadap peserta didik menunjukkan bahwa proses penerimaan siswa baru bagi ABK diberlakukan sama dengan anak lainnya. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (b) Adanya tenaga pendidik (guru) yang memadai, Berdasarkan hasil temuan penelitian komponen input terhadap tenaga pendidik (guru) menunjukkan bahwa tenaga pendidik (guru) memiliki kemampuan menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam rangka pelaksanaan program pendidikan inklusi. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (c) Adanya pemberlakuan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ABK, Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan sekolah adalah kurikulum reguler (umum) yang diduplikasikan atau diberlakukan sama baik untuk siswa normal maupun ABK. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan program pendidikan inklusif; (d) Adanya sarana dan prasarana khusus yang mendukung serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ABK, Terkait hasil temuan penelitian terhadap sarana umum sekolah menunjukkan katagori cukup memadai dan ini berarti sarana umum sekolah dinilai sebagian besar sudah dimiliki. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (e) Adanya penyediaan anggaran yang cukup yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat, Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap pembiayaan program menunjukkan bahwa saat ini pembiayaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif hanya dibiayai dari bantuan subsidi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui dana dekonsentrasi serta adanya bantuan dana dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Hasil temuan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Komponen Proses Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pada komponen proses penetapan kriteria keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 9 Kepala Sekolah dan 18 orang guru sebagai berikut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Komponen Proses Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Pernyataan	Skor Jawaban										Skor Total	
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi merencanakan dengan baik kegiatan pembelajaran pada program pendidikan inklusif.	5	18,5	19	70,4	3	11,1	-	-	-	-	27	100
2.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi mengembangkan kurikulum sekolah sesuai karakteristik ABK.	-	-	4	14,8	5	18,5	18	66,7	-	-	27	100
3.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi mampu menyelenggarakan kebiatan belajar mengajar dengan baik.	3	11,1	22	81,5	2	7,4	-	-	-	-	27	100
4.	Proses pembelajaran di kelas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ABK.	2	7,4	3	11,1	15	55,6	7	26,0	-	-	27	100
5.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi melakukan evaluasi dengan baik.	12	44,4	15	55,6	-	-	-	-	-	-	27	100

6.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi melaksanakan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik menggunakan standar kelulusan yang berbeda	1	3,7	6	22,2	18	66,7	2	7,4	-	-	27	100
7.	Personal penyelenggara program pendidikan inklusi mampu menyusun RPP dengan baik.	2	7,4	5	18,5	15	55,6	5	18,5	-	-	27	100
8.	Tenaga pendidik (guru) menyampaikan materi pembelajaran dengan baik.	3	11,1	2	7,4	7	26,0	15	55,6	-	-	27	100
Total		28		76		65		47		-	-	216	
Total x Skor		140		304		195		94		-	-	733	
Skor Ideal								1.080					
P (%)								67,9					

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016.

Secara lebih rinci, hasil penelitian indikator komponen proses penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat dijelaskan dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) Kegiatan perencanaan pembelajaran, Berdasarkan hasil temuan penelitian komponen proses melalui angket terhadap penilaian kegiatan perencanaan pembelajaran pada program pendidikan inklusif menunjukkan katagori baik. Hasil temuan pada aspek ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (b) Pelaksanaan pembelajaran, Terkait hasil temuan penelitian melalui angket terhadap penilaian kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program inklusif menunjukkan katagori baik. Hasil temuan ini dinilai sesuai kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (c) Evaluasi pembelajaran, Sedangkan hasil temuan penelitian melalui angket terhadap penilaian kegiatan evaluasi pembelajaran pada program pendidikan inklusif menunjukkan katagori cukup baik. Hasil temuan ini dinilai sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif; (d) Kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang kesulitan yang dihadapi guru dalam aspek kegiatan perencanaan pembelajaran khususnya dalam menyusun RPP menunjukkan bahwa guru merasa kesulitan dalam menuangkan indikator untuk dijadikan materi yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ABK. Demikian juga dalam menyiapkan bahan/materi dan merencanakan sumber belajar menunjukkan bahwa guru merasa kesulitan karena harus membuat bahan/materi ajar yang sesuai dengan karakterstik ABK. Hasil temuan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Komponen Produk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Adapun pada komponen produk penetapan kriteria keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 9 Kepala Sekolah dan 18 orang guru sebagai berikut.

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Komponen Produk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

No.	Pernyataan	Skor Jawaban										Skor Total	
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	ABK yang mengikuti ujian dapat dinyatakan lulus seluruhnya.	11	40,7	16	59,3	-	-	-	-	-	-	27	100
2.	Sekolah ini menghasilkan ABK yang berhasil melanjutkan studi ke sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.	7	26,0	18	66,7	2	7,4	-	-	-	-	27	100

3.	ABK mampu berbaur dengan teman-temannya di sekolah.	21	77,8	6	22,2	-	-	-	-	-	-	27	100
4.	Siswa normal dapat menerima keberadaan ABK di dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara bersama-sama.	10	37,0	15	55,6	2	7,4	-	-	-	-	27	100
Total		49		55		4		-	-			108	
Total x Skor		245		220		12		-	-			477	
Skor Ideal						540							
P (%)						88,3							

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016.

Secara lebih rinci, hasil penelitian indikator komponen proses penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat dijelaskan dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) Aspek hasil perkembangan akademik anak berkebutuhan khusus, Berdasarkan hasil temuan penelitian komponen produk terhadap perkembangan aspek akademik ABK menunjukkan bahwa perolehan nilai hasil belajar ABK dinilai cukup menggembirakan, artinya ABK yang mengikuti ujian dapat dinyatakan lulus seluruhnya, dan bahkan ada beberapa ABK yang memperoleh nilai melebihi nilai rata-rata kelas, di samping itu terdapat pula ABK yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata kelas; (b) Aspek perkembangan keterampilan sosial siswa di sekolah inklusif, Sedangkan hasil temuan penelitian terhadap perkembangan aspek sosial siswa menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif dan ini diperkuat pendapat (Nurwan, 2019; Sulistiyadi, 2014) menyatakan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi akademik tetapi juga kompetensi sosial.

KESIMPULAN

Komponen konteks kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sepenuhnya memenuhi kriteria dilihat dari belum tertuang dan ditemukannya secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan di negara kita. Komponen input penerimaan siswa baru ABK telah memenuhi kriteria, ini dilihat dari banyaknya ABK saat mendaftar diberlakukan sama dengan anak normal. Komponen proses penilaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara umum telah memenuhi kriteria dilihat dari nilai skor yang masuk katagori baik dan cukup baik. Komponen produk perkembangan tingkat pencapaian hasil belajar akademik ABK telah memenuhi kriteria dilihat dari perolehan nilai hasil UAS dan UN yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan masuk dalam katagori baik dan cukup baik. Dalam upaya mengoptimalkan kemampuan guru-guru yang berlatar belakang pendidikan khusus yang mengajar di SLB Negeri, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya kerja sama dengan melibatkan guru SLB Negeri untuk dapat membantu guru reguler di sekolah inklusif menangani ABK di sekolah inklusif. Disisi lain Pemerintah Daerah juga perlu mengupayakan penugasan dan penempatan kembali guru yang berlatar belakang pendidikan khusus dan mengajar di sekolah umum untuk mengajar di sekolah penyelenggara program inklusif terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- David Wijaya, S. E. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Prenada Media.
- Donohue, D., & Bornman, J. (2018). The Challenges of Realising Inclusive Education in South Africa. In *Learning and Teaching Around The World* (pp. 120–126). Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429491498-15>

- Gistituati, N., Hadiyanto, Sopandi, A. A., & Kusumastuti, G. (2020). *Development of an Instrument to Measure the Inclusive Classroom Climate*. 464(Psshers 2019), 193–196. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200824.045>
- Irvan, M. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 15(27), 67–78. <https://doi.org/10.36456/bp.vol15.no27.a1790>
- Jauhari, M. N. (2017). Pengembangan Sekolah Inklusif dengan Menggunakan Instrumen Indeks for Inclusion. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 13(23), 18–27.
- Kasidah, M. A. R. (2017). Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada sekolah dasar luar biasa negeri Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Kurniawan, N. A., & Aiman, U. (2020). Paradigma Pendidikan Inklusi Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Dan Diskusi Pendidikan Dasar*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mansur, H. (2018). *Implementasi Pendidikan Inklusif*.
- Mansur, H. (2019). *Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*.
- McMaster, C., & Elliot, W. (2014). Leading inclusive change with the index for inclusion: Using a framework to manage sustainable professional development. *Journal of Educational Leadership, Policy and Practice*, 29(1), 82–93.
- Moriña, A., & Carballo, R. (2017). The impact of a faculty training program on inclusive education and disability. *Evaluation and Program Planning*, 65, 77–83.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Polat, F. (2011). Inclusion in education: A step towards social justice. *International Journal of Educational Development*, 31(1), 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.009>
- Qomarudin, A., & Safrudin, S. (2021). Pendidikan Inklusif di SD Fastabiqul Khairat Kota Samarinda. *Nusantara*, 3(2), 121–138.
- Suleymanov, F. (2015). Issues of inclusive education: Some aspects to be considered. *Electronic Journal for Inclusive Education*, 3(4), 8.
- Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.